

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanggung jawab negara pada intinya adalah upaya merencanakan dan mewujudkan kesejahteraan bagi warganya. Oleh karena itu, negara perlu proaktif dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah, terutama di sektor ekonomi, serta terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial masyarakat. Pajak merupakan salah satu aspek penting untuk meningkatkan perekonomian negara. Pajak ialah salah satu sumber pendapatan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional, yang tujuannya adalah untuk memajukan atau meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat¹.

Pajak merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan memperoleh dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari masyarakat untuk membiayai kebutuhan rutin serta proyek pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Tujuan Negara salah satunya adalah mensejahterakan rakyat dan menciptakan kemakmuran yang berasaskan keadilan sosial. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Pajak adalah sumber pendapatan yang berperan penting dalam menyediakan dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak

¹Sinengkeian, Anjeyni, Joyce Rares, dan Gustaaf Budi Tampi, "*Komunikasi Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa.*" Vol. 8 No. 115, 2022, Jurnal Administrasi Publik, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38195>, diakses pada 13 Agustus 2023, hlm. 1.

merupakan sumber utama penerimaan negara. Dengan membayar pajak, masyarakat akan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

- a) Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan puskesmas.
- b) Pertahanan dan keamanan, seperti bangunan, senjata dan perumahan.
- c) Subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak.
- d) Kelestarian lingkungan hidup dan budaya.
- e) Dana pemilu.
- f) Pengembangan alat transportasi massa dan lainnya².

Di antara beberapa jenis Pajak yang ada, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang paling potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini di jelaskan dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³.

Menurut Peraturan Daerah Kota Jambi No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, terdapat lembaga yang bertugas mengoptimalkan penerimaan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, serta senantiasa melakukan kegiatan yang

²Neneng Hartati, *Pengantar Perpajakan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 40.

³Indra Mahardika Putra, *Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta, Quadrant, 2019, hlm. 250.

intensifikasi dan ekstensifikasi terkait pemungutan pajak melalui kegiatan pengawasan yang dilakukan wajib pajak, yaitu Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Jambi (BPPRD)⁴. Badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan sebagian tugas pemerintahan daerah terkait pendapatan daerah, berdasarkan prinsip otonomi dan pemberian bantuan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, badan tersebut bertugas merumuskan kebijakan teknis terkait pendapatan, mengatur administrasi dan layanan publik terkait pendapatan, memberikan bimbingan dan melaksanakan tugas terkait pendapatan, serta menjalankan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan mandat dan fungsi badan tersebut.

Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2021 memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Adapun tugas pokok dan fungsi BPPRD, yaitu sebagai berikut:

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Perencanaan pengelolaan Pajak Daerah.

⁴Nainggolan, Edisah Putra. "Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan." The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018, 2018.

- b) Pelaksanaan Analisa dan pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah
- c) Pelaksanaan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah
- d) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah
- e) Pelaksanaan Pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah
- f) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah
- g) Pelaksanaan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- h) Pelaksanaan Penetapan Wajib Pajak Daerah
- i) Pelaksanaan Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah
- j) Pelaksanaan Penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah
- k) Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
- l) Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- m) Pelaksanaan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
- n) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah
- o) Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi terkait untuk peningkatan Pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- p) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan Bidang tugas dan fungsinya.

Sebagai komponen utama yang memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ialah pajak yang dikenakan pada properti tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan, yang dimiliki oleh Wajib Pajak (WP). Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan orang pribadi atau badan yang menikmati, memanfaatkan atau memiliki obyek pajak berupa tanah dan atau bangunan tersebut⁵. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas pengumpulan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk edukasi, pengawasan, koordinasi, dan kolaborasi. Namun, ada juga faktor-faktor penghambat, seperti infrastruktur, lokasi tempat tinggal wajib pajak, dan proses pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT). Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak pun sering kali menyebabkan mereka memilih untuk tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena kurangnya pemahaman akan tujuan dan manfaat pajak.

Berkaitan dengan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak, sama halnya seperti yang terjadi di Kota Garut, Provinsi Jawa Barat. Di kota tersebut, tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih rendah. Wajib pajak sering menghadapi tantangan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena mereka enggan membayarnya dengan alasan-alasan tertentu dan kurang menyadari pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Karena khawatir tentang konsekuensi dari kewajiban PBB, sebagian besar wajib pajak cenderung mengabaikan atau mengesampingkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tidak sesuai.

⁵Suherman, Enjang, And Wina Marlia, *op.cit* ; 1523.

Akibatnya jika ada penagihan maka akan terungkap jumlah tunggakan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PBB di kota tersebut tidak mencapai target⁶.

Setiap tahunnya pemerintah kota menetapkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, seringkali target tersebut tidak tercapai sepenuhnya, bahkan terkadang penerimaan PBB jauh di bawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Kasus yang serupa terjadi di Kota Jambi, dimana terdapat beberapa kecamatan pada kota tersebut belum dapat merealisasikan target pajak bumi dan bangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Berikut data capaian realisasi PBB di Kota Jambi :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PBB di Kota Jambi 2020

NO.	Nama Kecamatan	Target	Tunggakan	Denda	Realisasi PBB	PRESENTAS I
						Realisasi PBB
1.	Kota Baru	3.331.510.513,00	543.825.311,00	172.573.129,00	2.754.668.852,00	82,69
2.	Jambi Selatan	3.004.427.428,00	431.252.384,00	143.892.380,00	2.676.367.745,00	89,08
3.	Jelutung	3.058.329.214,00	427.729.965,00	142.847.618,00	2.736.322.927,00	89,47
4.	Pasar Jambi	2.627.322.082,00	414.107.128,00	58.689.228,00	2.162.344.472,00	82,30
5.	Telanaipura	1.565.553.942,00	311.300.383,00	98.092.693,00	1.285.349.747,00	82,10
6.	Danau Teluk	81.741.193,00	17.210.012,00	5.948.709,00	60.614.777,00	74,15
7.	Pelayangan	342.193.174,00	18.380.289,00	6.694.082,00	160.752.011,00	46,98
8.	Jambi Timur	3.322.288.653,00	371.863.799,00	123.001.316,00	2.932.507.204,00	88,27
9.	Alam Barajo	4.327.179.333,00	645.456.523,00	212.787.470,00	2.994.565.119,00	69,20

⁶Nurbudiwati, Nurbudiwati, Ade Purnawan, and Helmi Achmad Fauzi. "Analisis Faktor Penghambat Pencapaian Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)." Jurnal Publik 16.02 (2022): 91-104.

10.	Danau Sipin	2.562.759.336,00	206.506.829,00	68.462.592,00	1.821.826.053,00	71,09
11.	Paal Merah	7.026.695.132,00	617.959.193,00	207.909.663,00	6.022.067.828,00	85,70
TOTAL		31.250.000.000,0 0	4.005.591.816,0 0	1.240.898.880,0 0	25.607.386.735,0 0	81,94

Sumber : Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2020

Tabel 1.2
Target dan Realisasi PBB di Kota Jambi 2021

NO	Nama Kecamatan	Target	Tunggakan	Denda	Realisasi PBB	PRESENTAS I
						Realisasi PBB
1.	Kota Baru	3.331.510.513,00	552.902.054,00	165.263.608,00	3.073.510.891,00	92,26
2.	Jambi Selatan	3.004.427.428,00	448.644.804,00	120.454.619,00	2.908.518.960,00	96,81
3.	Jelutung	3.058.329.214,00	576.718.447,00	165.677.780,00	3.193.726.791,00	104,43
4.	Pasar Jambi	2.627.322.082,00	359.726.061,00	98.587.454,00	2.326.821.651,00	88,56
5.	Telanaipura	1.565.553.942,00	353.321.420,00	104.060.118,00	1.385.638.923,00	88,51
6.	Danau Teluk	81.741.193,00	29.768.919,00	11.045.065,00	84.829.821,00	103,78
7.	Pelayangan	342.193.174,00	1.152.576.459,00	264.712.021,00	1.435.857.496,00	419,60
8.	Jambi Timur	3.322.288.653,00	636.046.677,00	206.596.087,00	3.510.401.252,00	105,66
9.	Alam Barajo	4.327.179.333,00	905.970.495,00	285.863.050,00	3.469.637.400,00	80,18
10.	Danau Sipin	2.562.759.336,00	323.730.062,00	86.571.075,00	2.166.426.660,00	84,53
11.	Paal Merah	7.026.695.132,00	798.507.662,00	220.467.959,00	6.704.188.134,00	95,41
TOTAL		31.250.000.000,0 0	6.137.913.060,0 0	##### #	30.259.557.979,0 0	96,83

Sumber : Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2021

Tabel 1.3
Target dan Realisasi PBB di Kota Jambi 2022

NO	Nama Kecamatan	Target	Tunggakan	Denda	Realisasi PBB	PRESENTASI
						Realisasi PBB
	Kota Baru	3.527.724.334,00	569.202.172,00	160.812.394,00	3.353.911.334,00	95,07
2	Jambi Selatan	3.036.121.193,00	513.543.561,00	150.245.853,00	3.317.631.338,00	109,27
3	Jelutung	3.229.484.394,00	758.339.804,00	232.486.309,00	3.772.123.890,00	116,80
4	Pasar Jambi	2.615.949.307,00	233.170.501,00	66.830.580,00	2.447.371.885,00	93,56
5	Telanaipura	1.539.046.158,00	434.610.707,00	107.586.871,00	1.591.739.897,00	103,42
6	Danau Teluk	118.123.981,00	22.712.047,00	7.727.938,00	86.921.161,00	73,58
7	Pelayangan	193.466.776,00	69.990.284,00	27.932.499,00	321.761.319,00	166,31
8	Jambi Timur	3.293.803.032,00	503.486.066,00	148.907.200,00	3.616.004.182,00	109,78
9	Alam Barajo	4.431.622.847,00	1.027.969.106,00	291.308.066,00	3.893.605.870,00	87,86
10	Danau Sipin	2.295.847.124,00	268.060.693,00	80.896.497,00	2.297.435.039,00	100,07
11	Paal Merah	6.968.810.854,00	772.668.514,00	211.653.546,00	7.220.657.435,00	103,61
TOTAL		31.250.000.000,00	5.173.753.455,00	1.486.387.753,00	31.919.163.350,00	102,14

Sumber : Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa kecamatan di Kota Jambi belum mencapai target PBB. Tentu hal tersebut tidak lepas dari faktor-faktor internal dan eksternal baik dari masyarakat maupun lembaga yang bertanggung jawab. Dimana dalam beberapa kasus penulis menemukan bahwa salah satu kendala tidak tercapainya target PBB adalah tidak adanya laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh masyarakat yang merupakan wajib pajak kepada lembaga yang bersangkutan. SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁷.

⁷Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1 Edisi 8. Jakarta, Salemba Empat, 2008, hlm. 31.

Dalam beberapa kasus lain, terdapat perubahan nama wajib pajak yang seringkali tidak tercatat secara akurat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), yang masih mencantumkan nama wajib pajak yang lama. Alamat yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak jelas, dan banyak wajib pajak yang memiliki properti tetapi tidak tinggal di daerah setempat. Terdapat juga kesalahan dalam SPPT yang disebabkan oleh ketidaksesuaian alamat objek pajak dengan keadaan sebenarnya, sehingga wajib pajak menolak menerima SPPT karena mereka merasa tidak memiliki objek pajak di alamat tersebut. Sehingga faktor-faktor tidak diterimanya SPPT kepada wajib pajak menyebabkan tidak tercapainya target pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat⁸. Selain itu, terdapat pula kasus dimana ajuan keberatan PBB tidak langsung ditangani oleh lembaga yang bersangkutan sehingga para wajib pajak harus melalui proses yang panjang untuk mendapatkan keputusan atas keberatan yang diajukan. Dalam hal lain terdapat masalah terkait tanah atau bangunan warisan yang tidak dilaporkan kepada pewaris. Kasus-kasus di atas merupakan beberapa penyebab tidak tercapainya PBB.

Sama halnya seperti yang terjadi di Kota Jambi. Di bawah ini merupakan tabel mengenai target dan realisasi PBB dari tahun 2020-2022 di Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi:

⁸ Martika Cahayani, Made Arie W., Nyoman Putra Y. “*Pengaruh Penerimaan SPPT, Moralitas Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*”. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT). Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 9, No. 01, hlm. 135 (2018).

Tabel 1.4
Target dan Realisasi PBB Kecamatan Pasar Jambi 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	Target PBB (Rupiah)	Realisasi PBB (Rupiah)	Presentase (%)
1.	2020	11.651	2.627.322.082,00	2.162.344.472,00	82,30
2.	2021	12.016	2.627.322.082,00	2.326.821.651,00	88,56
3.	2022	12.347	2.615.949.307,00	2.447.371.885,00	93,56

Sumber : Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2020-2022 realisasi PBB di Kecamatan Pasar Jambi tidak mencapai target. Hal tersebut tidak luput dari kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan PBB setiap tahunnya, serta kurang berhasilnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Untuk memastikan penelitian ini memiliki keunikan, perbedaan, dan kepentingan yang diperlukan, penting untuk mengidentifikasi fokus masalah dengan cermat. Oleh karena itu, penulis menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian ini untuk menunjukkan relevansi. Pertama, penelitian dengan judul “Evaluasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Upt Bapenda Kota Palu” yang ditulis oleh Andi Nurzaqiyah. Metode penelitian ini yaitu kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 mengalami presentase yang naik turun.

Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya peran pemerintah dalam pengawasan terhadap pengelolaan pajak⁹.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Endang Murdiani. Dengan judul penelitian “Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara. Penelitian ini memiliki hasil bahwa prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dalam pelaksanaannya pasti ada kendala yang dihadapi di antaranya faktor ekonomi sehingga minimnya kemampuan membayar pajak tepat waktu¹⁰.

Selain kedua penelitian sebelumnya, penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Edisah Putra Nainggolan. Dengan judul "Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan". Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diatas dimana Target Penerimaan PBB tidak mencapai target 6 Tahun Terakhir. faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak bumi dan bangunan pada BPPRD Kota Medan adalah Terdapat Wajib Pajak yang tidak jujur dalam

⁹Nurzaqiyah, Andi. “*Evaluasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Daerah Upt Bapenda Kota Palu*”. Diss. Universitas Tadulako, 2023.

¹⁰Murdiani, Endang. “*Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan*”. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

pembayaran pajaknya atau tidak benar dalam melaporkan kegiatan usahanya baik mulai operasi maupun pelaporan keuangan seperti pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)¹¹.

Perbedaan utama antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu bahwa penelitian yang akan dilakukan berfokus pada peran yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi khususnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Andi Nurzaqiyah yang berfokus pada hambatan-hambatan dalam pencapaian target PBB. Kemudian berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Endang Murdiani yang memiliki fokus prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan pengenaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Serta berbeda pula dengan penelitian milik Edisah Putra Nainggolan yang berfokus pada pengawasan kinerja BPPRD.

Dari analisis masalah sebelumnya yang telah dibahas serta studi sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah dalam rangka pemenuhan target PBB sangatlah penting. Namun pada kenyataannya tidak mudah untuk merealisasikan hal-hal yang telah disusun oleh pemerintah tersebut, baik dari segi internal itu maupun dari sumber daya manusia (SDM) yang berperan di dalamnya. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai masalah ini dengan melakukan penelitian dengan judul **"Peran Badan**

¹¹Nainggolan, Edisah Putra. *"Analisis Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan."* The National Conference on Management and Business (NCMAB) 2018, 2018.

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam pencapaian target PBB di Kecamatan Pasar Jambi?
2. Bagaimana strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam pencapaian target PBB di Kecamatan Pasar Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam pencapaian target PBB di Kecamatan Pasar Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi dalam pencapaian target PBB di Kecamatan Pasar Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pemerintahan dan dapat mengembangkan konsep-konsep ilmu

pemerintahan khususnya mengenai peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi pemenuhan PBB.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sarana untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
- b. Untuk dapat dijadikan implementasi terutama pada peran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk pencapaian target PBB agar kedepannya lebih optimal.

1.5 Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian, landasan teori merupakan salah satu aspek yang sangat penting karena akan menjadi acuan dalam berjalannya penelitian. Oleh karena itu, berikut penulis jabarkan beberapa landasan teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Peran

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono, peranan merupakan konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran melibatkan norma-norma yang berkembang sesuai dengan posisi atau status seseorang dalam masyarakat. Peran dalam konteks ini merujuk pada serangkaian aturan yang membimbing individu dalam interaksi sosial. Namun, dalam organisasi biasanya dibentuk unit kerja khusus yang mengelola sumber daya manusia, dan unit kerja

tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab atas berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia¹².

Peran merupakan aspek yang dinamis dari status sosial atau posisi seseorang dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa ketika seseorang memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya, orang tersebut dianggap telah menjalankan perannya. Konsep peran menekankan fungsi adaptasi dan dilihat sebagai suatu proses. Peran meliputi tiga elemen utama, yaitu:

- a) Peran adalah bagian dari aturan atau norma-norma yang mengarahkan individu dalam masyarakat.
- b) Peran adalah tindakan yang diharapkan dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
- c) Peran adalah tingkah laku individu yang memegang peran penting dalam struktur sosial masyarakat.

Selain pemerintah, partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam upaya pemberdayaan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam hal pemberdayaan adalah untuk membimbing masyarakat menuju kemandirian dan pembangunan, yang bertujuan menciptakan kemakmuran, bukan hanya mengandalkan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran pemerintah yang optimal sangat penting dalam membangun masyarakat. Peran Pemerintah menurut Ryaas Rasyid antara lain:

¹²Suryadi, Novan. "Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 2 (2020): 425-436.

a. Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembangunan, sehingga mendorong dan menjaga dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dengan memberikan bimbingan dan arahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang mendukung bagi pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat menyatukan berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan¹³.

2. Strategi

¹³Salsabila, Jihan, Jauhar Arifin, and Erwan Mardani. "Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua." *JAPB* 3.1 (2020): 107-123.

Kata strategi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *strategos* atau *streteus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* sendiri memiliki *generalship* atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Penggunaan kata *Strategos* itu dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki. Dengan sederhananya, strategi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Strategi merupakan rencana yang terintegrasi dengan tujuan utama suatu organisasi, mencakup kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah kegiatan yang saling terkait. Tujuan strategi adalah untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi agar mencapai posisi unik. Strategi yang efektif harus memperhitungkan kompetensi internal, kekurangan, dan mengantisipasi perubahan lingkungan.

Menurut Hasibuan, “strategi adalah cara untuk membantu organisasi mengatasi lingkungan yang selalu berubah dan membantu x organisasi untuk memecahkan masalah terpenting yang dihadapi. Dengan strategi, organisasi dapat membangun kekuatan dan mengambil keuntungan dari peluang sembari mengatasi dan meminimalisir kelemahan dan ancaman dari luar”. Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah serangkaian aktivitas perencanaan dan manajemen yang menggunakan taktik operasional untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan¹⁴.

¹⁴ Saputra, Aldi, and Novianita Rulandari. "Analisis Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Dki Jakarta Tahun 2019." *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* 2.1 (2020): 12-21.

a. Dimensi- Dimensi Strategi

Strategi digunakan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang penting dalam membentuk dan mengarahkan identitas organisasi, menentukan aktivitas organisasi, serta menjelaskan tujuan dari aktivitas tersebut. Menurut Winardi, berbagai dimensi yang terdapat dalam strategi pada suatu organisasi adalah:

- 1) Tujuan utama atau target utama yang harus dicapai. Tujuan atau target ini menggambarkan apa yang harus dicapai dan kapan hasilnya harus tercapai. Dari nilai-nilai yang ditetapkan, tujuan ini menunjukkan arah pergerakan organisasi melalui berbagai target organisasi yang komprehensif, yang menentukan karakteristik organisasi, dan menetapkan target bagi setiap unit organisasinya.
- 2) Kebijakan utama yang mengarahkan atau membatasi kegiatan. Kebijakan (*policies*) adalah aturan atau prosedur yang menetapkan batas-batas di mana kegiatan dapat dilakukan. Aturan-aturan semacam itu sering kali diambil untuk membuat keputusan-keputusan yang bersifat kontingen, untuk menyelesaikan konflik antara tujuan-tujuan yang spesifik.
- 3) Langkah-langkah utama atau program-program yang akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan. Program-program ini merinci langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan utama. Mereka menjelaskan bagaimana tujuan-tujuan tersebut akan dicapai sesuai dengan batasan yang diberlakukan oleh kebijakan. Program-program ini menetapkan arah alokasi

sumber daya untuk mencapai tujuan dan cara untuk mengukur kemajuan organisasi.

b. Proses Strategi dalam Organisasi

Strategi secara resmi diungkapkan dalam dokumen-dokumen yang disebut rencana, tetapi terkadang strategi tidak secara resmi dinyatakan, meskipun hal itu jelas terpikirkan oleh mereka yang terlibat. Definisi ini menekankan strategi sebagai suatu rencana, metode, atau serangkaian langkah atau taktik yang dilakukan untuk mencapai hasil atau tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Hasibuan, proses strategi dalam organisasi meliputi delapan langkah, yaitu:

- 1) Menginisiasi dan menyetujui suatu proses perencanaan strategis. Tujuan langkah pertama adalah menegosiasikan kesepakatan dengan para pembuat keputusan (*decision makers*) atau pembentuk opini (*opinion leaders*) internal (dan mungkin eksternal) tentang seluruh upaya perencanaan strategis dan langkah perencanaan yang terpenting.
- 2) Mengenali mandat organisasi, baik mandat formal dan informal yang di tempatkan pada organisasi adalah “keharusan” yang dihadapi organisasi.
- 3) Menyusun kembali misi dan nilai-nilai organisasi, di mana misi organisasi erat kaitannya dengan mandatnya, menjadi dasar moral bagi eksistensinya..
- 4) Mengevaluasi lingkungan eksternal: mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi dengan mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi..

- 5) Mengevaluasi lingkungan internal: mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal untuk memahami potensi dan tantangan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*inputs*), strategi sekarang (*process*), dan kinerja (*outputs*).
- 6) Menyusun isu-isu strategis yang dihadapi organisasi. Isu strategis, meliputi konflik satu jenis atau lainnya. Konflik dapat menyangkut tujuan (apa); cara (bagaimana); filsafat (mengapa); tempat (di mana); waktu (kapan); dan kelompok yang mungkin diuntungkan atau tidak diuntungkan oleh cara yang berbeda dalam pemecahan isu (siapa).
- 7) Merumuskan strategi untuk mengelola isu- isu. Strategi didefinisikan sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan, atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi, apa yang dikerjakan organisasi, mengapa organisasi harus melakukan hal tersebut.
- 8) Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Langkah terakhir dari proses manajemen strategis adalah mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

c. Pengukuran Strategi

Pengukuran strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis SWOT. Untuk mencapai tujuan organisasi, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai masalah, baik di lingkungan internal maupun eksternal. Hal ini dikenal dengan analisis SWOT,

yang mencakup analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal., yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal, meliputi:

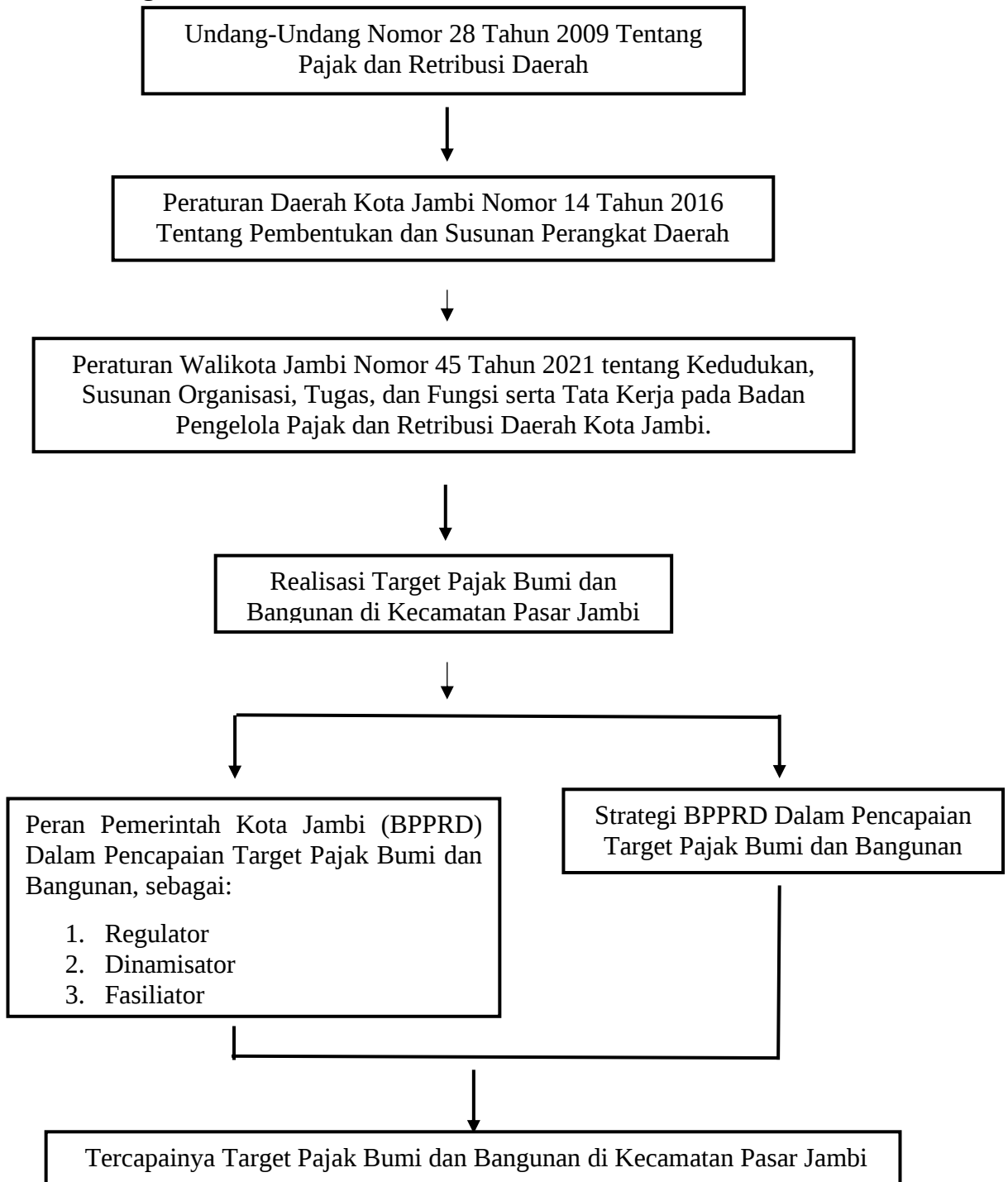
- a) *Strength* (Kekuatan), merupakan situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya.
- b) *Weakness* (Kelemahan), merupakan situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai tujuannya atau sebagai kondisi yang menempatkan organisasi pada ketidakberuntungan dan tidak kompetitif.

2. Analisis Lingkungan Eksternal, meliputi:

- a) *Opportunity* (Peluang), adalah situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi dalam mencapai atau bahkan melampaui pencapaian sasarannya.
- b) *Threat* (Tantangan), adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya¹⁵.

¹⁵ Dwi, Muhammad Nurseha. “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” Diss. Universitas Brawijaya, 2018.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mengumpulkan data melalui serangkaian proses yang sesuai dengan prinsip ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow, berkaitan dengan data non-numerik, mengumpulkan dan menganalisis data secara naratif. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang kaya dan informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang sedang diteliti. Metode penelitian kualitatif menggunakan *focus group*, *interview* secara mendalam, dan observasi berperan serta dalam mengumpulkan data¹⁶.

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengamati objek dalam konteks alamiahnya, berbeda dengan eksperimen. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi, menganalisis data secara induktif, dan menekankan makna dari pada generalisasi dalam hasil penelitian¹⁷. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena peneliti ingin menggambarkan fenomena yang diamati dari berbagai sumber data dan menjelaskannya dalam bentuk narasi.

¹⁶Sugiyono, *Metode*, (Bandung *Penelitian Kualitatif*: Alfabeta, 2022), hlm.3.

¹⁷Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 9

1.7.2 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mengambil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, serta Kecamatan Pasar Jambi sebagai lokasi penelitian.

1.7.3 Fokus Penelitian

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini akan difokuskan pada peran dan strategi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi untuk mewujudkan capaian target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.7.4 Sumber Data

Sumber data adalah mencakup semua informasi yang dapat memberikan data. Peneliti kualitatif seringkali memilih untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan diperoleh dari:

a. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang berasal dari studi literatur, laporan, buku, atau jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer dan bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif.

b. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung dari situasi atau tempat yang diteliti. Data primer sangat

penting untuk mendukung hasil penelitian karena memberikan informasi yang sesuai dengan realitas di lapangan. Dalam penelitian ini, sumber data primer terdiri dari wawancara dan observasi.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang disesuaikan dengan tujuan atau maksud penelitian¹⁸. Teknik *purposive sampling* adalah bagian dari teknik *nonprobability sampling*, di mana teknik ini tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel. Dengan demikian, peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Adapun informan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Pemilihan informan ini dikarenakan kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi memiliki wewenang dalam membuat strategi untuk memenuhi target PBB.
- b. Staff Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.
- c. Camat Kecamatan Pasar Jambi
- d. Ketua RT pada setiap Kelurahan di Kecamatan Pasar Jambi.

¹⁸Sugiyono, *Ibid.*, hlm. 96.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik-teknik pengumpulan data yang dipilih oleh peneliti:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, wawancara dapat dijelaskan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau responden melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat dianggap sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dan responden, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan tentang objek penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Ada beberapa macam jenis wawancara yaitu wawancara terencana-terstruktur, wawancara terencana-tidak terstruktur, dan wawancara bebas¹⁹.

Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara terencana-terstruktur. Wawancara terencana-terstruktur melibatkan penyusunan rencana pertanyaan secara terperinci dan sistematis sesuai dengan pola yang telah ditetapkan, dengan menggunakan format standar. Dalam jenis wawancara ini, pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan mencatat jawaban dari sumber informasi secara tepat²⁰.

¹⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm.372.

²⁰A. Muri Yusuf, *Ibid.*, hlm. 376.

b. Observasi

Menurut Marshall dan Rossman observasi adalah deskripsi secara sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam *setting* sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi dapat bervariasi mulai dari yang sangat terstruktur dengan catatan rinci mengenai tingkah laku sampai dengan deskripsi yang paling kabur tentang kejadian dan tingkah laku²¹.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan penggunaan karya tertulis atau rekaman mengenai sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Dokumentasi tentang individu, kelompok individu, peristiwa, atau kejadian dalam konteks sosial yang relevan dengan fokus penelitian merupakan sumber informasi yang berharga dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat berbentuk teks tulisan, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumentasi tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis, dan cerita²².

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen, analisis data adalah proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan materi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan. Hal ini memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Analisis data

²¹Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*.(Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 172.

²²A. Muri Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 391.

dimulai dengan menelusuri dan mencari catatan data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diorganisir dan dikelompokkan ke dalam unit-unit yang relevan. Selanjutnya, dilakukan sintesis data, pengidentifikasian pola, dan pemilihan informasi yang penting dan esensial sesuai dengan aspek yang diteliti. Proses ini diakhiri dengan pembuatan kesimpulan dan penyusunan laporan. Menurut Spradley, analisis data adalah cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian sistematis mengenai sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Pada dasarnya, analisis data bertujuan untuk menemukan pola tentang sesuatu yang diteliti.²³

Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Model analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga kegiatan analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Proses reduksi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang didapatkan dari catatan tertulis saat penelitian lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan. Meskipun peneliti memperoleh banyak informasi, tidak semua informasi tersebut relevan atau berkontribusi dalam mengungkap masalah penelitian. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan secara

²³A. Muri Yusuf, *Ibid.*, hlm. 400-401.

bertahap selama penelitian, karena jika dilakukan pada akhir penelitian, jumlah informasi yang harus disaring akan semakin besar.

b. Penyajian Data

Adalah kegiatan yang melibatkan penyajian hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan sementara dan merencanakan langkah selanjutnya. Jika masih ada data yang kurang lengkap, memerlukan klarifikasi, atau belum didapatkan, presentasi data dapat membantu mengidentifikasi hal-hal tersebut.

c. Verikasi/Penarikan Kesimpulan.

Merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya. Simpulan ini dapat berupa simpulan sementara maupun simpulan akhir (*final*)²⁴

1.7.8 Keabsahan Data

Cambell dan Fiske berpendapat bahwa para peneliti harus menggunakan lebih dari satu instrumen untuk mengukur sebuah variabel²⁵. Triangulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Salah satu cara untuk melakukan triangulasi adalah dengan menggunakan sumber yang beragam dan metode yang berbeda. Dalam melakukan triangulasi dengan menggunakan sumber yang beragam, peneliti mencari informasi yang sama dari berbagai sumber yang berbeda.

²⁴ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 11-12.

²⁵*Ibid.*, hlm. 323.

Penggunaan sumber yang beragam dapat diinterpretasikan dalam dua hal, yaitu jumlah sumber yang digunakan dan variasi sumber yang digunakan dalam mengumpulkan informasi yang sama.

Penggunaan metode yang berbeda dapat dimengerti sebagai langkah untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Misalnya, setelah mengumpulkan informasi melalui observasi pada tahap awal, metode wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tambahan yang sama. Jika masih ada ketidakpastian, peneliti dapat mencari informasi lebih lanjut dalam dokumentasi terkait aspek yang sama dengan yang diamati dan diwawancarai.²⁶

²⁶A. Muri Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 395.